

# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 – 4233347 – 4230963 Faksimil (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id BANDUNG - 40115

PENGUMUMAN PENDAFTARAN NOMOR: 07/KU.03.10.02/Pbj

#### **TENTANG**

### PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG ELEKTRONIK LOKAL ETALASE PRODUK MOBIL *WINGBOX* MULTIGUNA

Bersama ini kami mengundang para Pelaku Usaha Produk Mobil Wingbox Multiguna untuk turut serta dalam proses pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik. Adapun rincian produk, persyaratan Penyedia dan Produk adalah sebagai berikut:

#### A. Informasi Produk

Etalase Komoditas	Kategori
MOBIL WINGBOX MULTIGUNA	Mobil Wingbox Multiguna

#### B. Syarat Penyedia:

- 1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog):
  - ☐ Produsen/Principal
  - ✓ Agen Pemegang Merek (APM)
  - ✓ Distributor
- 2. Syarat Kualifikasi, Teknis dan Harga Calon Penyedia Katalog
  - A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Syarat Kualifikasi Administrasi/LegalitasPenyedia Barang/Jasa, yang meliputi:

1) Persyaratan bagi Agen Pemegang Merek (APM) adalah sebagai berikut:

Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.

- a. Memiliki ijin usaha sesuai peraturan perundangan
- b. Bidang Usaha:
  - Industri Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih (Kode KBLI 29100);dan/atau
  - Perdagangan Besar Mobil Baru (Kode KBLI 45101); dan/atau
  - Perdagangan Eceran Mobil Baru ( Kode KBLI 45103); dan/atau
  - Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris (Kode KBLI 45301);
- 2) Persyaratan bagi Main Dealer/Dealer adalah sebagai berikut :
  - 1. Memiliki ijin usaha sesuai peraturan perundangan

#### a. Bidang Usaha:

- Perdagangan Besar Mobil Baru (Kode KBLI 45101); dan/atau
- Perdagangan Eceran Mobil Baru (Kode KBLI 45103); dan/atau
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris (Kode KBLI 45301);
- 2. memiliki Surat Keterangan Pengakuan Keagenan Kendaraan Bermotor dan/atau Surat Penunjukan sebagai Main Dealer/Dealer dari APM;
- 3) Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 4) Memiliki Sertifikat ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu;
- 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
  - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
  - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
  - d. Kartu Tanda Penduduk.
- 6) Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
  - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengadaan ini;
  - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan/atau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7) Menyetujui Pernyataan yang berisi:
  - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - b. badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
  - d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
  - e. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - f. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;

- g. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen ini;
- h. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

#### B. Syarat Teknis

- 1) Melampirkan surat Keterangan:
  - a. Identitas (jenis, tipe dan merek) atas produk yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
  - b. Kategori Kendaraan Roda 4 dengan Kapasitas > 2400 cc.
  - c. Memiliki jaringan distributor untuk layanan penjualan, suku cadang dan pemeliharaan.
- 2) Memiliki Surat Uji Tipe (SUT) Chassis kendaraan atas nama APM dan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB) atas nama Karoseri, Kategori yang sesuai dengan spesifikasi Mobil wingbox Multiguna.
- 3) Melampirkan Surat Pernyataan kesanggupan sebagai berikut:
  - Calon penyedia dapat memenuhi spesifikasi Mobil *Wingbox* Multiguna;
  - Calon penyedia sanggup mengurus dokumen kelayakan kendaraan sampai diterbitkan STNK dan BPKB.
- 4) Memiliki Sertifikat/Keterangan TKDN (apabila ada)
- 5) Memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan bermotor dari Kementerian Perhubungan;

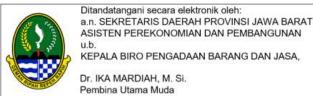
#### C. Mekanisme Pencantuman Barang/Jasa Katalog Elektronik

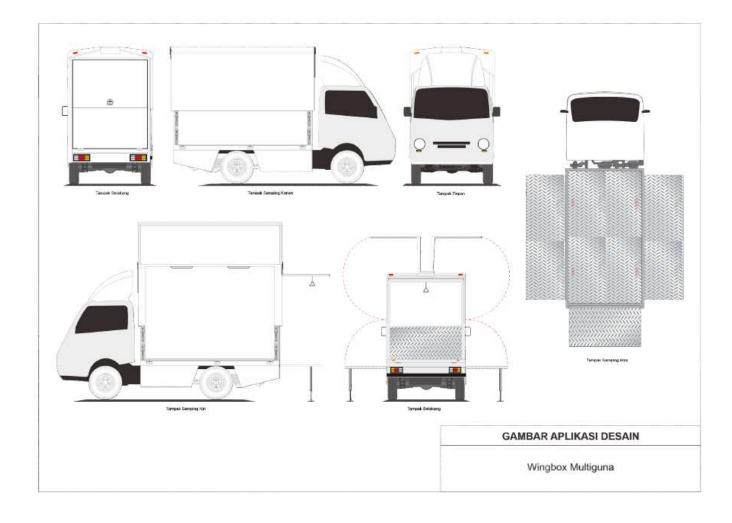
- 1. Pelaku Usaha yang berminat perlu memiliki akun sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) terlebih dahulu. Bagi Pelaku Usaha yang belum memiliki akun SPSE dapat melakukan proses pendaftaran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terdekat.
- 2. Selanjutnya, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran dan menyampaikan:
  - a. Upload scan bukti dokumen syarat penyedia dan syarat Produk sebagaimana tersebut diatas;
  - b. Input informasi spesifikasi produk dan harga (per kabupaten/kota) pada aplikasi Katalog Elektronik.
  - Adapun Panduan Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik dapat di unduh pada laman <u>www.e-katalog.lkpp.go.id</u>
- 3. Perlu kami sampaikan bahwa proses pencantuman barang/jasa katalog elektronik ini mengacu pada surat keputusan Surat Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik yang dapat diunduh pada website <a href="www.jdih.lkpp.go.id">www.jdih.lkpp.go.id</a>.

4. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi batch kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.

Para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini wajib mematuhi Etika Pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN u.b. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA





## Format Surat Pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk dan Harga

### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN INFORMASI PRODUK DAN HARGA

Sava wang bertanda tangan di bawah ini

Saya yang berta	anda tangan di bawan ini.
Nama	:[nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas	:[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan	:
Bertindak untuk	: PT/CV/Firma/Koperasi[pilih yang sesuai dan atas nama cantumkan nama]
dalam rangka bahwa:	penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan
	na/Koperasi bertanggung jawab atas informasi esifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui etronik.
0 70 1 1	

- 2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau subtansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
- 4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
- 5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
- 6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
- 7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
- 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
- 9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili

bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat],\_\_\_\_[tanggal][bulan] 20\_\_\_\_[tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi\_\_\_\_\_[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 10.000,-dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha]